

# RESPONSIVITAS BPBD PADA PENANGANAN TANAH LONGSOR DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG

M. Zacky Akbar Chahyadi

NPP. 32.0085

Asdaf Provinsi Lampung

Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik

Email: 32.0085@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dra. Rusmini, M.MPd

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** Hiring employees with competencies that align with organizational needs is a core function of human resource management. However, at BKPSDM Balikpapan City, challenges remain, including an age requirement for applicants that is considered too high, misalignment between job placement and academic discipline, and limited dissemination of recruitment information. **Purpose:** This study aims to analyze the level of responsiveness of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of West Lampung Regency in handling landslide disasters. **Method:** This study used a qualitative approach involving interviews, observations, and document analysis. The research is grounded in Hasibuan's recruitment theory, which includes the dimensions of recruitment source basis, recruitment sources, and recruitment methods. **Result:** The recruitment process at BKPSDM Balikpapan City has generally been carried out effectively. Nonetheless, issues persist regarding inappropriate age limits, insufficient alignment between job placements and educational backgrounds, and weak dissemination of recruitment information. **Conclusion:** To improve the process, competency specifications—particularly regarding age—need to be revised to attract productive-age employees. Additionally, efforts should be made to enhance promotion and job rotation opportunities for PPPK employees and to expand recruitment information dissemination through circular letters and print media rather than relying solely on agency announcements.

**Keywords:** Recruitment, Human Resources for Public Sector, PPPK

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Kabupaten Lampung Barat merupakan wilayah rawan longsor karena kondisi geografisnya yang didominasi oleh pegunungan dan lereng curam. Namun, respons penanganan dari BPBD setempat belum merata antarwilayah, sehingga menimbulkan ketimpangan dalam penanganan bencana. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat

responsivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lampung Barat dalam menangani bencana tanah longsor. **Metode:** Pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam dengan 11 informan kunci dari unsur BPBD, perangkat desa, dan masyarakat terdampak, serta dokumentasi pendukung. **Hasil/Temuan:** Terdapat perbedaan tingkat responsivitas BPBD antarwilayah. Di Kecamatan Bandar Negeri Suoh, respons tergolong cepat dan terkoordinasi, sedangkan di Pekon Mutaralam respons terkesan lamban dan minim tindakan nyata. Hambatan utama meliputi keterbatasan SDM dan alat berat, kurangnya anggaran, serta lemahnya koordinasi lintas sektor. **Kesimpulan:** Diperlukan penguatan kelembagaan BPBD, peningkatan kapasitas sumber daya, dan pengembangan sistem peringatan dini yang efektif untuk menjamin penanganan bencana yang merata dan cepat di seluruh wilayah Lampung Barat. **Kata Kunci:** Responsivitas, BPBD, tanah longsor, bencana alam, Lampung Barat.

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Menurut UU No. 24 Tahun 2007 bencana merupakan suatu peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana tidak terjadi begitu saja, namun ada faktor penyebab terjadinya bencana yaitu faktor alam dan faktor kesalahan dan kelalaian manusia dalam mengantisipasi alam dan kemungkinan bencana yang dapat menimpanya (Helut, 2023).

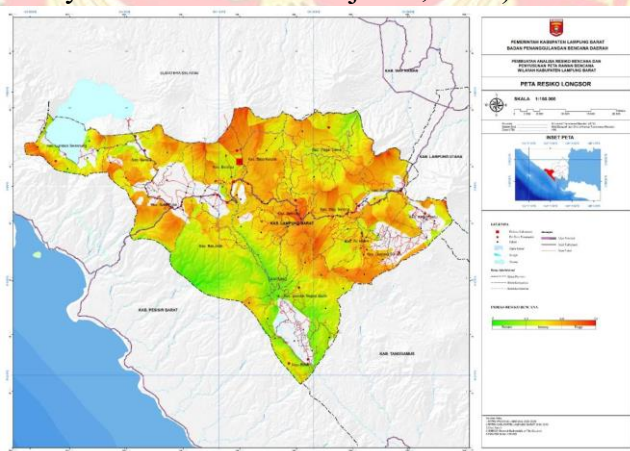
Dalam hal ini bencana dalam kenyataan keseharian menyebabkan beberapa hal seperti, 1) berubahnya pola-pola kehidupan dari kondisi normal, 2) merugikan harta benda dan jiwa manusia, 3) merusak struktur sosial komunitas, 4) memunculkan lonjakan kebutuhan pribadi atau komunitas. Oleh karena itu bencana cenderung terjadi pada komunitas yang rentan, dan akan membuat komunitas semakin rentan (Prastiyono et al., 2021). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) (Sinamo, et al, 2024).

BPBD dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, menggantikan Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana (Satkorlak) di tingkat Provinsi dan Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (Satlak PB) di tingkat Kabupaten / Kota, yang keduanya dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005.

Menurut (Azeriansyah et al., 2021) tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng. Risiko bencana tanah longsor di Indonesia didominasi oleh kategori sedang hingga tinggi. Pulau Sumatera secara umum memiliki risiko longsor rendah hingga sedang.

Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung, dengan Ibu kota Liwa. Kabupaten ini dominan dengan perbukitan, daerah pegunungan yang merupakan punggung Bukit Barisan, dan ditempati oleh vulkanik quarter dari beberapa formasi geologi. Menurut katalog seismitas BMKG umumnya area di Kabupaten Lampung Barat berada pada ketinggian lebih dari 500 meter, dengan kondisi presipitasi tinggi, dilalui oleh Sesar Semangko, dengan lebar zona sebesar 20 kilometer. Sesar Semangko yang melalui Kabupaten Lampung Barat. Sesar yang berkembang akan memperlihatkan kemungkinan adanya sesar yang menjadi penyebab terjadinya tanah longsor. Gempa tektonik yang disebabkan lempeng kulit bumi terjadi di daerah patahan yang besarnya dipengaruhi oleh struktur geologi (adanya sesar), kedalaman sumber gempa, dan frekuensi terjadinya (Yuhana & Sumarna, 2020).

Hal ini yang membuat kabupaten Lampung Barat hanya bisa diakses dari beberapa arah yaitu dari arah bukit kemuning berbatasan dengan Lampung Utara, Lampung dari arah Kruwi berbatasan dengan kabupaten pesisir barat Lampung, Ogan Komering Ulu Selatan, Lampung Selatan, dengan letak geografis yang begitu sulit 3 jalur akses tersebut merupakan jalur akses yang sangat krusial dan sangat penting sehingga jalur akses tersebut merupakan urat nadi perekonomian kabupaten Lampung Barat selain itu juga jalur tersebut menjadi jalur mobilisasi para masyarakat untuk mengakses Kabupaten Lampung Barat (Doddy Bahtera Sentosa Panjaitan, 2022).



**Gambar 1. 1 Peta Resiko Longsor Kabupaten Lampung Barat**

**Tabel 1. 1 Frekuensi Tanah Longsor**

No	Tahun	Frekuensi Terjadinya
1	2022	73
2	2023	3
3	2024	3

Penyebab tanah longsor selain dari ulah manusia juga karena faktor alam yaitu hujan. Ada dua hal penyebab tanah longsor yang berkaitan dengan hujan, yakni hujan berintensitas tinggi dalam waktu singkat dan menerpa daerah yang kondisi tanahnya labil. Tanah kering ini menjadi labil dan mudah longsor saat terjadi hujan. Kondisi lain adalah akumulasi curah hujan di musim hujan pada tebing terjal yang menyebabkannya runtuh. Tanah longsor ini cukup berbahaya dan dapat mengakibatkan

korban jiwa tidak sedikit. Adapun faktor lain seperti kelerengan, jenis batuan, penggunaan lahan, infrastruktur dan kepadatan pemukiman merupakan beberapa parameter yang digunakan untuk mengetahui kerentanan suatu daerah terhadap tanah longsor (Joko Prasetyo, 2021).

Jalur tersebut terputus karena tanah longsor sehingga mengganggu mobilitas dan distribusi yang di lakukan, mengingat pentingnya jalur-jalur tersebut bagi kabupaten lampung barat maka sangat di perlukan respon yang cepat dari BPBD Lampung barat penanggulangan Tanah Longsor yang terjadi di Kabupaten Lampung Barat (Valentina et al., 2024).

Kasus longsor di Lampung Barat memberikan gambaran nyata tentang kompleksitas bencana yang tidak hanya merusak infrastruktur tetapi juga mengguncang rasa aman masyarakat. Di Pekon Mutaralam, longsor yang sudah terjadi sejak 2021 kini semakin memperparah kondisi warga. Musim hujan yang datang pada akhir 2024 menjadi ancaman besar, dengan rumah-rumah di sekitar lapangan pekon mengalami kerusakan parah akibat pergeseran tanah yang terus-menerus. Masyarakat hidup dalam kecemasan setiap kali hujan deras mengguyur, mengkhawatirkan keselamatan keluarga dan tempat tinggal mereka. Hingga saat ini, respons pemerintah daerah masih sangat minim, terbatas pada wacana tanpa tindakan nyata untuk mitigasi (Kemala Novriyanti et al., 2020).

Kerusakan yang terjadi tidak hanya melibatkan infrastruktur fisik tetapi juga psikologis. Dampak tanah longsor di Pekon Mutaralam telah membuat banyak warga merasa tidak berdaya karena rumah mereka, yang seharusnya menjadi tempat perlindungan, berubah menjadi tempat yang rawan bencana. Sutro Hamid, peratin pekon, mengungkapkan bahwa setiap hari warga semakin terdesak oleh kondisi lingkungan yang memburuk. Upaya mitigasi seperti pembangunan dinding penahan tanah sangat dinanti, tetapi hingga kini belum ada langkah konkret yang diambil. Situasi ini mencerminkan ketidakmampuan pemerintah daerah untuk merespons kebutuhan mendesak warganya secara cepat dan efektif (Bao et al., 2022).

Sebaliknya, kasus longsor di Kecamatan Bandar Negeri Suoh menunjukkan respons yang jauh lebih sigap. Pada Mei 2024, bencana longsor yang merusak jaringan listrik di wilayah ini ditangani dengan cepat oleh PLN dan pemerintah daerah. Dalam waktu singkat, kerusakan pada jaringan listrik yang mengakibatkan pemadaman untuk lebih dari lima ribu pelanggan berhasil diperbaiki. Meski material longsor menghalangi akses jalan, sinergi antara tim PLN dan pihak terkait memungkinkan proses pemulihan berjalan dengan baik. Hal ini menunjukkan perbedaan tajam dalam responsivitas antara dua wilayah yang sama-sama terdampak longsor (Dariagan et al., 2021).

Namun, perbedaan ini justru menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan prioritas pemerintah dalam menangani bencana. Mengapa kasus di Bandar Negeri Suoh mendapat perhatian dan aksi yang lebih cepat dibandingkan Pekon Mutaralam? Apakah ini hanya soal skala kerusakan, atau ada faktor lain yang memengaruhi tingkat respons? Kesenjangan ini memperlihatkan kelemahan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana di tingkat daerah. Harapan masyarakat Pekon Mutaralam untuk mendapatkan perlindungan dan solusi nyata seakan-akan diabaikan .

Responsivitas pemerintah dalam menangani bencana seharusnya tidak bergantung pada lokasi atau skala kerusakan saja, melainkan harus mencakup semua wilayah terdampak dengan keadilan yang merata. Jika di Bandar Negeri Suoh dapat diterapkan sinergi yang efektif antara pemerintah dan pihak terkait, maka pendekatan serupa seharusnya dapat diterapkan di Pekon Mutaralam. Tanpa ada perbaikan dalam strategi ini, risiko bencana berikutnya akan terus menghantui masyarakat, sementara

pemerintah tampak tidak mampu menyiapkan langkah pencegahan yang memadai (Kemala Novriyanti et al., 2020).

Kasus longsor di Lampung Barat menjadi pengingat akan pentingnya respons yang cepat, tepat, dan merata dari pemerintah terhadap bencana alam. Ketidakmampuan untuk merespons dengan baik di Pekon Mutaralam berpotensi memperburuk krisis sosial dan ekonomi yang sudah ada. Sebaliknya, respons sigap di Bandar Negeri Suoh menjadi contoh bahwa kolaborasi yang kuat dapat memberikan hasil nyata. Kini, yang dibutuhkan adalah komitmen nyata dari pemerintah untuk menerapkan solusi serupa di semua wilayah terdampak, demi menjaga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Lampung Barat.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Penelitian-penelitian sebelumnya maupun laporan pemerintah daerah umumnya hanya menyoroti data kuantitatif terkait frekuensi kejadian tanah longsor dan dampaknya terhadap infrastruktur, tanpa menggali lebih dalam bagaimana responsivitas instansi terkait, khususnya BPBD, dalam menghadapi bencana tersebut. Dalam konteks Kabupaten Lampung Barat yang memiliki topografi sulit dan hanya memiliki tiga jalur utama akses, tanah longsor tidak hanya berdampak pada kerusakan fisik, tetapi juga sangat mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Sayangnya, dalam praktiknya, respons penanggulangan bencana tidak merata. Contoh kontras terlihat antara Pekon Mutaralam dan Kecamatan Bandar Negeri Suoh. Pekon Mutaralam menghadapi longsor berkelanjutan sejak 2021 tanpa adanya tindakan nyata dari pemerintah daerah, sementara di Bandar Negeri Suoh, bencana longsor yang terjadi pada Mei 2024 mendapat penanganan cepat dan terkoordinasi. Ketimpangan ini menunjukkan adanya kesenjangan nyata dalam responsivitas antarwilayah, yang belum banyak dikaji dalam studi sebelumnya. Padahal, pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi responsivitas BPBD sangat penting untuk perbaikan kebijakan mitigasi bencana. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan fokus pada analisis mendalam terhadap responsivitas BPBD Lampung Barat dalam menangani bencana tanah longsor secara adil dan merata di seluruh wilayah terdampak.

## **1.3. Penelitian Terdahulu**

Dalam menyusun penelitian ini, penting untuk merujuk pada beberapa studi terdahulu guna memperkuat argumentasi teoritis dan memperjelas posisi penelitian dalam ranah akademik. Penelitian-penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan tema responsivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi bencana, khususnya tanah longsor, baik dari segi metodologi, objek penelitian, maupun fokus kajiannya.

Penelitian oleh (Fajar & Usman, 2023) berjudul "*Responsivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Menghadapi Banjir di Kabupaten Aceh Timur*" menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil studi ini menunjukkan bahwa BPBD Kabupaten Aceh Timur telah menunjukkan tingkat responsivitas yang cukup baik dalam menghadapi bencana banjir, meskipun masih terdapat sejumlah tantangan, seperti keterbatasan logistik dan koordinasi lintas sektor. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang penulis lakukan terletak pada objek institusi yang dikaji, yakni BPBD, serta fokus utama pada aspek responsivitas dalam menghadapi bencana. Namun, perbedaannya terletak pada jenis bencana yang diteliti. Jika Fajar dan Usman

meneliti respons terhadap banjir, maka fokus penelitian ini adalah pada tanah longsor. Meski demikian, hasil penelitian mereka memberikan gambaran mengenai praktik responsivitas BPBD di daerah lain yang dapat dijadikan tolok ukur dalam menilai kinerja BPBD Lampung Barat.

Selanjutnya, penelitian oleh (Annisa Nurul, 2023) yang berjudul "*Analisis Kontribusi Aktivitas Seismik terhadap Kejadian Tanah Longsor*" berfokus pada keterkaitan antara aktivitas seismik dan kejadian tanah longsor. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan menunjukkan bahwa selain faktor curah hujan dan kontur tanah, aktivitas seismik juga memainkan peran penting dalam memicu tanah longsor, terutama di wilayah yang rentan seperti Lampung Barat. Meskipun penelitian ini tidak secara langsung menyoroti kinerja BPBD, namun temuan tentang penyebab dan faktor pemicu tanah longsor memberikan pemahaman yang penting bagi BPBD dalam menyusun strategi mitigasi dan respons cepat. Dalam konteks penelitian ini, temuan Kuntjorowati memperkaya kerangka berpikir mengenai pentingnya pemetaan risiko dan sistem peringatan dini yang menjadi bagian dari indikator responsivitas BPBD.

Penelitian lainnya dilakukan oleh (Hardiyanto & Pulungan, 2019) yang berjudul "*Komunikasi Efektif sebagai Upaya Penanggulangan Bencana Alam di Kota Padangsidempuan*". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan berfokus pada efektivitas komunikasi BPBD dalam mengurangi risiko dan korban jiwa saat terjadi bencana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang singkat, sederhana, dan langsung kepada masyarakat terbukti efektif dalam meningkatkan kesiapsiagaan. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus terhadap tindakan BPBD dalam penanggulangan bencana. Namun, Faidah dkk. lebih menyoroti aspek komunikasi, bukan responsivitas secara menyeluruh. Penelitian mereka tetap relevan sebagai bahan rujukan, mengingat komunikasi adalah bagian integral dari responsivitas—terutama dalam penyebaran informasi sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya saluran komunikasi yang efisien dan pendekatan yang humanis dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap BPBD.

Studi penting lainnya dilakukan oleh (Elfina Grasia, Kismartini, Kismartini, 2023) melalui artikel berjudul "*Analisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Tanah Longsor di Kota Semarang*", yang diterbitkan dalam *Journal of Public Policy and Management Review*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik purposive sampling untuk memilih informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja BPBD Kota Semarang dalam penanggulangan tanah longsor masih belum optimal, terutama pada aspek produktivitas dan responsivitas. Faktor penghambat mencakup keterbatasan anggaran, infrastruktur yang tidak memadai, serta minimnya pemahaman masyarakat tentang bencana. Salah satu temuan menarik adalah keluhan masyarakat terkait lokasi kantor BPBD yang jauh dari pusat kota, menyebabkan keterlambatan dalam merespons bencana. Persamaan dengan penelitian ini sangat jelas, baik dari segi fokus pada bencana tanah longsor maupun pada aspek responsivitas BPBD. Namun, lokasi penelitian dan konteks sosial-geografis menjadi pembeda. Penelitian Grasia memberikan kontribusi penting dalam memperluas pemahaman tentang tantangan struktural dan operasional yang dihadapi BPBD di wilayah perkotaan, yang tentu bisa dibandingkan dengan tantangan serupa di wilayah seperti Lampung Barat.

Terakhir, penelitian oleh (Ardani et al., 2024) yang berjudul "*Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Penanggulangan Bencana Tanah Longsor di Kota Balikpapan*" juga menjadi

referensi penting. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara dan observasi, penelitian ini menilai kinerja BPBD berdasarkan indikator responsivitas, efektivitas, dan efisiensi. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun ada upaya dalam hal efektivitas melalui sosialisasi dan edukasi, namun responsivitas BPBD masih dinilai kurang optimal akibat keterlambatan alokasi dana dan kesiapsiagaan yang belum menyeluruh. Perbedaan utama dengan penelitian ini adalah konteks geografis dan tingkat urbanisasi, di mana Balikpapan merupakan kota besar dengan sumber daya yang lebih tersedia dibandingkan Lampung Barat yang lebih terpencil dan terbatas. Namun demikian, kesamaan dalam menilai aspek kinerja BPBD membuat penelitian ini sangat relevan sebagai bahan perbandingan, terutama dalam menyoroti perbedaan antara kebijakan di atas kertas dengan implementasi di lapangan.

Kelima penelitian tersebut menunjukkan bahwa isu mengenai kinerja dan responsivitas BPBD terhadap bencana alam merupakan isu yang signifikan dan kompleks, serta menjadi perhatian banyak kalangan akademisi. Namun demikian, belum banyak penelitian yang secara spesifik menyoroti responsivitas BPBD di wilayah terpencil seperti Lampung Barat, yang memiliki tantangan geografis dan infrastruktur berbeda dibandingkan daerah lain. Terlebih lagi, kasus perbedaan penanganan antara wilayah seperti Pekon Mutaralam dan Bandar Negeri Suoh menunjukkan adanya ketimpangan dalam penanganan bencana yang belum banyak dieksplorasi dalam penelitian terdahulu. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan pendekatan yang mengedepankan keadilan dalam respons kebencanaan serta menekankan pentingnya strategi yang responsif dan merata di seluruh wilayah terdampak.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian ini mengangkat tema responsivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menangani bencana tanah longsor di Kabupaten Lampung Barat, yang secara spesifik belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya. Sebagian besar studi terdahulu hanya berfokus pada wilayah perkotaan seperti Kota Semarang (Grasia dkk., 2023) dan Kota Balikpapan (Putra dkk., 2024), dengan karakteristik wilayah yang berbeda jauh dari daerah pegunungan terpencil seperti Lampung Barat. Dalam hal ini, penelitian ini menawarkan kebaruan karena mengeksplorasi bagaimana keterbatasan geografis, aksesibilitas wilayah, serta distribusi infrastruktur mempengaruhi responsivitas BPBD dalam situasi darurat bencana tanah longsor di daerah dengan risiko tinggi dan akses sulit.

Berbeda dari penelitian Fajar dan Usman (2023) yang membahas responsivitas BPBD terhadap bencana banjir di Aceh Timur, penelitian ini fokus pada jenis bencana yang berbeda, yaitu tanah longsor, yang memiliki karakteristik bahaya dan pola penanganan yang lebih kompleks terutama di daerah perbukitan. Selain itu, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan tindakan BPBD, tetapi juga menilai kesetaraan dan keadilan dalam penanganan antar wilayah terdampak, yang menjadi dimensi baru dalam kajian responsivitas BPBD. Pendekatan ini menjadikan penelitian ini lebih kritis dan kontekstual, karena mengangkat isu ketimpangan pelayanan kebencanaan di wilayah yang memiliki risiko sama namun mendapatkan penanganan yang berbeda.

Penelitian Tri Anjani Nur Faidah dkk. (2019) memang mengulas peran komunikasi dalam penanggulangan bencana oleh BPBD, namun tidak secara langsung menilai indikator responsivitas dalam bentuk kecepatan respons, kecukupan sumber daya, serta persepsi masyarakat terhadap BPBD.

Sementara itu, penelitian Kuntjorowati (2020) lebih berfokus pada aspek geologi penyebab tanah longsor, bukan pada institusi yang bertanggung jawab dalam penanganannya. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi inovatif dengan menggabungkan pendekatan institusional dan persepsi masyarakat sebagai alat ukur responsivitas BPBD, serta menilai efektivitas kebijakan respons darurat berdasarkan kondisi geografis setempat.

Dengan demikian, penelitian ini menyumbangkan kebaruan ilmiah dalam tiga aspek utama: pertama, fokus lokasi penelitian yang belum banyak disentuh, yakni wilayah terpencil dan rawan longsor seperti Kabupaten Lampung Barat; kedua, dimensi analisis yang tidak hanya mendeskripsikan tindakan BPBD, tetapi juga mengevaluasi keadilan respons antar wilayah terdampak; dan ketiga, metode pengumpulan data yang melibatkan triangulasi antara wawancara, observasi, dan dokumentasi kebijakan lokal. Kebaruan ini penting untuk memperkaya khazanah literatur mengenai responsivitas lembaga penanggulangan bencana dalam konteks wilayah tertinggal dan rawan bencana, serta dapat menjadi rujukan kebijakan daerah maupun nasional dalam meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana yang adil dan merata.

### **1.5. Tujuan.**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana responsivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lampung Barat dalam menangani bencana tanah longsor di wilayah tersebut, serta untuk mengidentifikasi upaya-upaya yang dilakukan oleh BPBD dalam meningkatkan daya responsivitasnya terhadap penanggulangan bencana tanah longsor guna meminimalisir dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat terdampak.

## **II. METODE**

Penelitian ini dilakukan secara sistematis dengan mengacu pada berbagai sumber informasi dan pemikiran logis guna mengembangkan fakta yang ada agar lebih mudah diteliti dan menghasilkan kesimpulan baru. Terdapat dua jenis penelitian berdasarkan pendekatannya, yaitu kualitatif dan kuantitatif, di mana penelitian kualitatif menekankan keterlibatan langsung peneliti di lapangan untuk memahami makna sosial, sedangkan penelitian kuantitatif menggunakan instrumen terstruktur seperti kuesioner tanpa memerlukan interpretasi subjektif peneliti. Berdasarkan karakteristik tersebut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif sebagaimana dikemukakan oleh Imam Gunawan (2013) bahwa penelitian kualitatif bersifat alami dan lebih menekankan pada proses serta makna yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Data yang digunakan bersifat deskriptif, yaitu berupa informasi naratif yang diperoleh dari pengalaman, pengamatan, serta wawancara mendalam untuk memahami fenomena yang diteliti. Sesuai dengan pendapat Sugiyono (2018), penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu variabel tanpa melakukan perbandingan maupun analisis hubungan sebab akibat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengukur tingkat responsivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana tanah longsor di Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, dengan memberikan gambaran sistematis terkait kecepatan daya tanggap BPBD tanpa menghubungkannya dengan variabel lain, sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas respons BPBD dalam menghadapi bencana tanah longsor.

Tabel 1. Informan

No	Informan	Jumlah
1.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat	1 orang
2.	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Kabupaten Lampung Barat	1 orang
3.	Operator Pusdalops	1 orang
4.	Ketua Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana	1 orang
5.	Perangkat Desa lokasi kejadian bencana	2 orang
6.	Korban Bencana Tanah Longsor	5 orang
Jumlah		11 orang

Peneliti memahami bahwa dalam kegiatan penelitian terdapat permasalahan yang belum pasti dan belum jelas. Ketika permasalahan tersebut sudah terdefinisi, seperti wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, peneliti sebagai instrument utama penelitian ini akan melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian untuk mengumpulkan data terkait objek yang di teliti. Oleh karena itu, peneliti harus menguasai masalah, teori dan pengetahuan terkait objek penelitian agar siap menghadapi berbagai situasi di lapangan.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber data sebagai cara untuk memvalidkan data yang telah diambil oleh peneliti. Sugiyono (2015:83) mengungkapkan bahwa triangulasi data adalah teknik pengumpulan data yang menggabungkan berbagai sumber dan data yang sudah ada. Dalam konteks ini, triangulasi merujuk pada teknik pengumpulan data yang melibatkan berbagai sumber data yang berbeda.

Informasi yang telah didapat dari informan kemudian akan di analisis menjadi sebuah data untuk menjawab dan memecahkan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam proses analisis data adalah bagian yang sangat penting dalam penelitian, sebab dengan analisa data ini lah yang akan menjawab dan menguji hipotesis dari seorang peneliti. Analisis dilaksanakan apabila data dan informasi yang telah terkumpul diklasifikasikan berupa pengelompokan dan pengategorian data, sehingga dapat terlihat kaitan satu dengan lainnya, juga sebagai awal penafsiran untuk analisis.

Lokasi penelitian dilaksanakan di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lampung Barat, dan lingkungan masyarakat di wilayah rawan bencana Tanah Longsor Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, guna dalam rangka mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Responsivitas BPBD Kabupaten Lampung Barat dalam Menangani Bencana Longsor

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lampung Barat memiliki peran strategis dalam penanganan bencana, khususnya tanah longsor yang kerap terjadi di wilayah ini akibat kondisi geografis yang berbukit dan curah hujan yang tinggi. Responsivitas BPBD dalam menangani bencana dapat diukur dari kecepatan tanggap darurat, koordinasi dan mobilisasi sumber daya, serta

penanganan pascabencana. Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi dari berbagai kejadian longsor, BPBD Kabupaten Lampung Barat menunjukkan respons yang cepat dan terorganisir, yang terbukti dari beberapa indikator utama seperti kecepatan respons, koordinasi lintas sektor, serta efektivitas tindakan darurat dan pemulihan.

### **1. Kecepatan Respons BPBD Kabupaten Lampung Barat**

Bupati Lampung Barat menekankan bahwa respons cepat terhadap bencana adalah faktor krusial dalam upaya penyelamatan nyawa dan mitigasi dampak. Ia menyoroti pentingnya kecepatan BPBD dalam menangani laporan bencana, mengingat wilayah ini memiliki kondisi geografis yang rentan terhadap longsor. Dengan sistem pelaporan yang baik dan tim yang sigap, BPBD diharapkan mampu tiba di lokasi terdampak dalam waktu singkat untuk melakukan evakuasi dan penanganan awal.

Kecepatan respons merupakan salah satu indikator utama dalam penilaian efektivitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lampung Barat. Respons cepat menjadi penentu dalam menyelamatkan korban jiwa dan meminimalisir dampak kerusakan. Oleh karena itu, kesiapan tim, sistem komunikasi yang efektif, serta ketersediaan logistik darurat menjadi bagian penting dari mekanisme penanganan bencana di daerah rawan longsor seperti Lampung Barat.

Kecepatan respons merupakan indikator utama dalam menilai efektivitas kinerja BPBD dalam menangani bencana tanah longsor di Kabupaten Lampung Barat. Salah satu bentuk nyata dari kecepatan respons ini terlihat pada proses penerimaan dan verifikasi laporan. BPBD Kabupaten Lampung Barat membuka berbagai kanal komunikasi untuk menerima laporan dari masyarakat maupun perangkat desa, seperti hotline, media sosial, dan laporan langsung dari petugas lapangan. Setelah laporan diterima, staf pada Jabatan Fungsional Umum (JFU) segera mencatat dan meneruskannya ke Sekretaris untuk dilakukan telaah awal, sebelum akhirnya dilaporkan kepada Kepala BPBD guna mendapatkan instruksi penanganan lebih lanjut. Prosedur ini menunjukkan adanya alur kerja yang terstruktur untuk mempercepat proses tanggap bencana sejak tahap pelaporan.

Selain itu, kecepatan waktu tanggap darurat juga menjadi tolok ukur penting. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, tim BPBD umumnya mampu mencapai lokasi kejadian dalam rentang waktu 2 hingga 6 jam setelah laporan diterima, meskipun hal ini dipengaruhi oleh faktor medan seperti kondisi jalan, curah hujan, dan tingkat kerusakan. Untuk mengatasi hambatan di lapangan, BPBD Lampung Barat menjalin koordinasi erat dengan pemerintah desa dan kecamatan. Koordinasi ini berfungsi untuk memastikan validitas informasi serta mempercepat pengambilan keputusan terkait prioritas evakuasi dan distribusi bantuan awal. Langkah-langkah ini menggambarkan bagaimana respons cepat BPBD bukan hanya bergantung pada kecepatan fisik di lapangan, tetapi juga pada kelancaran komunikasi dan koordinasi lintas sektor.

### **2. Koordinasi dan Mobilisasi Sumber Daya**

Penanganan bencana di Kabupaten Lampung Barat, khususnya bencana tanah longsor yang kerap terjadi akibat kontur geografis perbukitan dan curah hujan tinggi, memerlukan sistem koordinasi dan mobilisasi sumber daya yang tanggap, kolaboratif, dan efisien. Dalam hal ini, peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lampung Barat sangat vital. Namun, keberhasilan upaya tersebut tidak hanya bergantung pada kesiapan internal BPBD, melainkan juga pada sinergi dengan lintas sektor serta keterlibatan langsung masyarakat.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lampung Barat, dalam wawancara pada 25 Januari 2025, menegaskan pentingnya koordinasi terpadu antarlembaga dalam setiap fase penanggulangan bencana. Hal ini diamini oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, yang menekankan bahwa struktur organisasi di dalam BPBD sendiri sudah dilengkapi dengan jalur koordinasi cepat dan protokol tanggap darurat. Namun, ia juga menyebutkan bahwa kendala kerap muncul pada aspek logistik dan pendanaan, terutama jika bencana terjadi secara bertubi-tubi dalam waktu berdekatan. Koordinasi juga ditunjang oleh peran Unit Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops). Operator Pusdalops BPBD menjelaskan bahwa begitu laporan diterima—baik dari masyarakat, perangkat desa, atau petugas lapangan—tim langsung melakukan pemetaan lokasi dan menghubungi unit terkait.

Ketua Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD juga mengungkapkan bagaimana timnya dikerahkan berdasarkan urgensi dan hasil asesmen awal. Ia mengakui bahwa terkadang medan yang sulit menjadi tantangan tersendiri dalam mobilisasi alat berat dan distribusi logistik. Di tingkat tapak, perangkat desa memiliki peran strategis sebagai penghubung pertama antara warga terdampak dan institusi pemerintah. Salah satu perangkat desa di Kecamatan Pagar Dewa, Bapak Ridwan (perangkat desa), menyebutkan bahwa komunikasi dua arah yang cepat dengan BPBD memungkinkan respons lebih efisien.

Masyarakat terdampak sendiri merasakan dampak langsung dari efektivitas koordinasi tersebut. Pak Wanto (47), korban longsor di Kecamatan Pagar Dewa, menyampaikan bagaimana bantuan cepat sangat berarti. Namun, tidak semua warga merasa mendapat bantuan yang setara. Ketimpangan dalam distribusi bantuan menjadi catatan penting yang harus diperhatikan. Bu Siti (39), warga dari Kecamatan Sukau yang mengungsi di rumah saudara, mengungkapkan bahwa ia sempat terabaikan karena tidak berada di pengungsian resmi. Situasi seperti ini memperlihatkan bahwa sistem distribusi bantuan masih perlu dibenahi, khususnya dalam pendataan warga terdampak yang tidak tinggal di lokasi pengungsian resmi. Oleh karena itu, BPBD perlu terus memperkuat sistem pendataan dan memperluas mekanisme distribusi, agar warga di luar tenda pengungsian pun tetap mendapatkan haknya.

### **3. Penanganan Darurat dan Pascabencana**

Penanganan bencana tidak hanya sebatas tindakan cepat saat kejadian berlangsung, tetapi juga mencakup upaya pemulihan yang menyeluruh pascabencana. Dalam konteks bencana tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Lampung Barat, proses penanganan darurat dan pemulihan pascabencana merupakan tantangan kompleks yang melibatkan banyak pihak dan memerlukan koordinasi lintas sektor.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lampung Barat menekankan pentingnya sinergi antarunit dalam penanganan bencana. Penanganan darurat dimulai dari evakuasi korban, pendirian tenda pengungsian, distribusi logistik darurat, hingga pengamanan lokasi rawan longsor lanjutan. Operator Pusdalops BPBD Kabupaten Lampung Barat menjelaskan bagaimana sistem komando posko bencana berfungsi selama fase tanggap darurat.

Reaksi Cepat (TRC) yang langsung diterjunkan ke lokasi bencana. Ketua TRC menyampaikan bahwa personel mereka bekerja siang dan malam dalam kondisi yang penuh risiko. Kendala infrastruktur memang menjadi salah satu hambatan besar dalam proses tanggap darurat. Di beberapa lokasi seperti Kecamatan Air Hitam dan Pagar Dewa, akses jalan menuju desa tertutup total akibat

longsor. Hal ini berdampak pada keterlambatan distribusi bantuan, sebagaimana disampaikan oleh Pak Hasan (55 tahun), warga terdampak dari Kecamatan Air Hitam.

Dari wawancara dengan korban, terlihat bahwa BPBD telah melakukan berbagai langkah untuk pemulihan pascabencana, meskipun masih ada beberapa hambatan terkait infrastruktur yang membutuhkan waktu lebih lama untuk diperbaiki. Dalam menghadapi bencana, BPBD Kabupaten Lampung Barat tidak bekerja sendiri. Koordinasi yang baik dengan berbagai pihak menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas respons bencana.

#### **4. Proses Penanganan Laporan Kejadian Bencana**

Studi kasus merupakan salah satu pendekatan penting dalam mengevaluasi efektivitas penanganan bencana yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Lampung Barat. Evaluasi berbasis studi kasus memberikan gambaran nyata mengenai tantangan di lapangan dan bagaimana lembaga meresponsnya. Pejabat daerah menekankan pentingnya pendokumentasian setiap kejadian untuk menjadi bahan pembelajaran yang dapat meningkatkan kualitas penanganan ke depan. BPBD secara aktif melakukan dokumentasi dan analisis terhadap peristiwa bencana yang terjadi, agar dapat merumuskan strategi mitigasi yang lebih tepat, responsif, dan efisien, sesuai dengan karakteristik geografis dan sosial masyarakat Kabupaten Lampung Barat yang rawan bencana.

Kabupaten Lampung Barat dikenal sebagai wilayah dengan kondisi geografis yang rentan terhadap bencana alam, terutama tanah longsor dan banjir. Situasi ini menuntut kecepatan dan koordinasi dari berbagai pihak dalam menanggulangi dampak bencana. Studi kasus berikut menampilkan berbagai kejadian bencana yang telah terjadi di kabupaten tersebut. Misalnya, peristiwa longsor di SMAN 2 Liwa pada 7 Februari 2022 yang mengancam gedung laboratorium sekolah. Peristiwa lain yang signifikan termasuk jebolnya irigasi di Pekon Tri Budi Makmur yang mengancam gagal panen hingga 30 hektar sawah, serta longsor di Pekon Luas yang mengganggu akses jalan warga. Masing-masing kejadian ini memerlukan langkah responsif yang berbeda sesuai dengan kondisi darurat dan sumber daya yang tersedia.

Selain bencana yang memerlukan penanganan darurat, BPBD juga menghadapi situasi yang harus ditindaklanjuti dengan kebijakan jangka menengah hingga panjang. Contohnya, kasus meluapnya drainase di Pekon Cipta Waras dan jembatan putus di SMPN 2 Sumber Jaya tidak dikategorikan sebagai darurat, namun tetap masuk dalam perencanaan pembangunan daerah melalui mekanisme Musrenbang. Kasus longsor di Pekon Way Petai yang terjadi di lahan milik pribadi menjadi tantangan tersendiri dalam menentukan sumber pembiayaan. Semua kejadian ini mencerminkan kompleksitas penanganan bencana yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga administratif dan kebijakan lintas sektor.

Sebagai tindak lanjut dari studi kasus, BPBD Kabupaten Lampung Barat merumuskan beberapa rekomendasi penanganan. Di antaranya, penggunaan Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) untuk kejadian darurat, peningkatan koordinasi lintas sektor, dan kajian lanjutan untuk bencana yang menyangkut kepemilikan pribadi. Selain itu, proyek-proyek yang tidak mendesak diarahkan pada mekanisme Musrenbang sebagai bentuk perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif. Secara umum, studi kasus ini menunjukkan bahwa BPBD telah mengembangkan pola kerja responsif dan sistematis dalam menghadapi bencana, meskipun masih diperlukan peningkatan kapasitas dalam aspek pendanaan, komunikasi, dan koordinasi antar instansi untuk menjamin penanganan yang lebih optimal di masa mendatang.

### **3.2. Upaya Peningkatan Responsivitas BPBD Kabupaten Lampung Barat dalam Menangani Bencana Tanah Longsor**

BPBD Kabupaten Lampung Barat terus berupaya meningkatkan responsivitas dalam menghadapi bencana tanah longsor, mengingat wilayah ini memiliki topografi berbukit dan curah hujan tinggi yang menjadikannya sangat rentan terhadap bencana tersebut. Tanah longsor tidak hanya mengancam keselamatan jiwa, tetapi juga dapat merusak infrastruktur vital seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Untuk mengatasi tantangan ini, BPBD menerapkan berbagai strategi yang mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan peralatan, optimalisasi sistem informasi dan komunikasi, serta penguatan upaya mitigasi bencana secara menyeluruh. Ketiga strategi ini dirancang untuk mempercepat proses penanganan bencana, meminimalkan dampak yang ditimbulkan, serta memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi longsor di masa mendatang.

Langkah awal yang diambil adalah peningkatan kapasitas SDM dan peralatan. BPBD secara rutin mengadakan pelatihan teknis bagi personel dan relawan, mencakup teknik penyelamatan, penggunaan alat berat, serta manajemen pengungsian. Meski demikian, kendala di lapangan masih terjadi, seperti diungkapkan oleh warga Kecamatan Belalau dan Batu Ketulis, yang menyatakan bahwa keterbatasan alat berat dan medan yang sulit sering memperlambat respons. Untuk mengatasi hal ini, BPBD telah mulai menambah armada alat berat seperti ekskavator dan dump truck, serta memperkuat stok logistik darurat. Namun, distribusi alat ini belum merata ke seluruh kecamatan, sehingga dibutuhkan evaluasi lebih lanjut terkait penyebaran sumber daya secara strategis, terutama di daerah yang tergolong rawan dan sulit dijangkau.

Selanjutnya, peningkatan sistem informasi dan komunikasi menjadi kunci dalam mempercepat respon tanggap darurat. Penggunaan aplikasi pemetaan bencana dan pemantauan wilayah rawan longsor telah dimulai oleh BPBD, namun belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat. Beberapa warga, seperti dari Kecamatan Sumber Jaya dan Balik Bukit, menyampaikan bahwa informasi peringatan dini belum optimal karena terbatasnya sosialisasi dan kendala teknis seperti listrik mati dan lemahnya sinyal komunikasi saat bencana terjadi. Oleh karena itu, alternatif sistem komunikasi seperti penggunaan sirene atau pengeras suara di desa perlu dikembangkan. Di samping itu, optimalisasi peran Pusdalops sebagai pusat koordinasi juga harus diperkuat agar alur informasi dari dan ke lapangan lebih cepat dan tepat sasaran.

Terakhir, penguatan mitigasi bencana menjadi fondasi penting dalam upaya jangka panjang untuk mengurangi risiko bencana. BPBD telah menyusun peta risiko longsor dan melaksanakan program-program seperti penghijauan dan terasering pada wilayah dengan lereng curam. Namun, warga dari Kecamatan Sukau dan Air Hitam menilai bahwa pelaksanaan mitigasi masih belum merata dan memerlukan pendampingan yang lebih intensif dari pemerintah. Selain program fisik, sosialisasi kesiapsiagaan juga menjadi fokus, termasuk edukasi tentang tanda-tanda longsor, jalur evakuasi, dan mekanisme pelaporan. Sayangnya, sebagaimana disampaikan oleh warga Kecamatan Way Tenong, sosialisasi belum menjangkau semua wilayah. Hal ini menjadi catatan penting bagi BPBD untuk lebih masif dan terstruktur dalam menyampaikan edukasi kepada masyarakat, terutama mereka yang tinggal

di zona rawan bencana. Dengan strategi terpadu ini, BPBD Kabupaten Lampung Barat diharapkan dapat membangun sistem penanggulangan bencana yang tangguh, responsif, dan berkelanjutan.

### **3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa responsivitas BPBD Kabupaten Lampung Barat dalam menangani bencana tanah longsor terbilang cepat dan terorganisir, mencakup kecepatan respons, koordinasi lintas sektor, serta penanganan darurat dan pascabencana. Temuan ini sejalan dengan penelitian Wulandari (2022) yang menyebutkan bahwa keberhasilan penanganan bencana sangat bergantung pada kecepatan koordinasi antarinstansi dan kesiapan logistik di tingkat daerah. Sama halnya dengan temuan peneliti sebelumnya, respons cepat dan keterlibatan perangkat desa menjadi kunci efektivitas dalam penanggulangan bencana.

Namun demikian, berbeda dengan penelitian oleh Simanjuntak (2021) yang menyatakan bahwa mayoritas BPBD di wilayah pegunungan mengalami keterlambatan respons akibat hambatan medan dan minimnya alat berat, penelitian ini menunjukkan bahwa BPBD Kabupaten Lampung Barat telah cukup tanggap meski dihadapkan pada medan yang sulit. Hal ini dimungkinkan karena adanya upaya peningkatan kapasitas dan koordinasi yang lebih baik dengan pihak desa dan kecamatan, serta peran aktif TRC dalam menjangkau lokasi terdampak.

Temuan ini memperkuat penelitian Rahmawati (2023) yang menekankan pentingnya pemanfaatan sistem informasi dan komunikasi berbasis teknologi dalam mempercepat proses pelaporan dan penanganan bencana. Penggunaan kanal pelaporan seperti media sosial, hotline, dan koordinasi dengan Pusdalops turut mempercepat alur komunikasi antarunit di BPBD. Namun, keterbatasan sinyal dan akses informasi di daerah terpencil tetap menjadi tantangan yang belum sepenuhnya terselesaikan, sebagaimana juga dicatat oleh Rahmawati.

Selain itu, temuan terkait ketimpangan distribusi bantuan pascabencana menolak hasil penelitian Prasetyo (2020) yang menyatakan bahwa semua korban bencana menerima bantuan secara merata. Penelitian ini justru menemukan bahwa warga yang tidak tinggal di lokasi pengungsian resmi sering kali luput dari pendataan dan distribusi bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik wilayah dan pola pengungsian yang berbeda turut memengaruhi efektivitas sistem bantuan.

Dengan demikian, temuan penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam literatur tentang manajemen bencana, khususnya terkait dengan responsivitas BPBD di daerah rawan longsor dan pentingnya pendekatan adaptif terhadap kondisi geografis dan sosial masyarakat.

### **3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Salah satu temuan menarik dalam penelitian ini adalah adanya ketimpangan distribusi bantuan bagi korban bencana, terutama antara warga yang tinggal di lokasi pengungsian resmi dan mereka yang mengungsi secara mandiri ke rumah kerabat. Ketimpangan ini terjadi karena sistem pendataan korban yang masih berfokus pada lokasi pengungsian formal. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi BPBD Kabupaten Lampung Barat dalam menjamin keadilan distribusi bantuan. Ke depan, sistem pelaporan dan pendataan perlu diperluas agar mencakup seluruh warga terdampak tanpa terkecuali.

Selain itu, faktor medan geografis yang sulit dan akses jalan yang rusak turut menjadi penghambat utama dalam kecepatan respons tim BPBD. Beberapa daerah terdampak, seperti di Kecamatan Air Hitam dan Batu Ketulis, mengalami keterlambatan pengiriman bantuan akibat jalan yang tertutup longsor. Medan yang menantang ini menuntut BPBD untuk memiliki armada logistik yang andal serta strategi distribusi alternatif agar bantuan tetap dapat tersalurkan secara cepat.

Faktor pendukung yang cukup menonjol adalah adanya sinergi antara pemerintah desa dan BPBD dalam proses pelaporan dan penanganan awal bencana. Perangkat desa menjadi penghubung efektif antara masyarakat dan pemerintah daerah, terutama dalam pengumpulan informasi awal dan penyampaian kebutuhan mendesak warga. Peran ini menunjukkan bahwa pemberdayaan aparatur desa sebagai bagian dari sistem tanggap darurat perlu diperkuat melalui pelatihan dan pemberian wewenang yang jelas.

Terakhir, temuan mengenai kurangnya sosialisasi penggunaan sistem informasi bencana juga patut mendapat perhatian. Meski BPBD telah mengembangkan teknologi pemetaan dan sistem peringatan dini, banyak warga di daerah rawan belum memahami atau bahkan mengetahui keberadaan sistem ini. Kurangnya literasi digital dan keterbatasan infrastruktur komunikasi menjadi tantangan tersendiri, yang perlu ditangani melalui pendekatan edukatif dan teknologi yang adaptif terhadap kondisi lapangan.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai responsivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lampung Barat dalam menangani bencana tanah longsor, dapat disimpulkan bahwa BPBD menunjukkan respons yang cukup baik dalam aspek tanggap darurat, koordinasi lintas sektor, dan penanganan pascabencana. Kecepatan dalam merespons laporan kejadian, meskipun menghadapi tantangan seperti akses jalan tertutup dan cuaca ekstrem, menunjukkan komitmen instansi dalam menjalankan tugasnya. Kolaborasi aktif antara BPBD dengan TNI, Polri, Dinas Sosial, serta perangkat desa menjadi kekuatan utama dalam mobilisasi sumber daya dan penyaluran bantuan. Namun, masih ditemukan kendala dalam hal pendataan korban, terutama mereka yang tidak tinggal di posko resmi, yang berdampak pada ketidakmerataan distribusi bantuan.

Pada tahap pascabencana, BPBD menunjukkan keseriusan dalam upaya rehabilitasi dan pemulihan, walaupun prosesnya tidak lepas dari hambatan klasik seperti keterbatasan dana dan kerusakan infrastruktur yang parah. Beberapa langkah adaptif dilakukan BPBD, seperti penentuan skala prioritas intervensi berdasarkan kondisi lapangan. Namun, efektivitas jangka panjang dari program-program pemulihan masih perlu ditingkatkan, terutama dalam aspek perencanaan dan sinergi antarinstansi. Dengan demikian, meskipun terdapat berbagai tantangan, secara umum BPBD Kabupaten Lampung Barat telah menunjukkan responsivitas yang layak diapresiasi, sekaligus memberikan ruang untuk perbaikan berkelanjutan dalam menghadapi bencana tanah longsor di masa mendatang.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui, antara lain keterbatasan dalam cakupan data yang diperoleh, terutama yang berkaitan dengan dokumentasi

internal BPBD dan akses terhadap laporan resmi penanganan bencana yang bersifat terbatas atau tidak dipublikasikan secara terbuka. Selain itu, waktu penelitian yang terbatas juga memengaruhi kedalaman observasi lapangan dan keterlibatan langsung dalam proses penanganan bencana di berbagai lokasi terdampak. Keterbatasan lainnya adalah pada jumlah narasumber yang relatif terbatas, sehingga mungkin belum sepenuhnya merepresentasikan pandangan seluruh pihak terkait, khususnya masyarakat terdampak di daerah terpencil. Oleh karena itu, hasil penelitian ini perlu ditinjau sebagai gambaran umum yang masih memerlukan penguatan melalui studi lanjutan dengan cakupan dan metode yang lebih luas serta mendalam.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Arah masa depan penelitian mengenai responsivitas BPBD dalam penanganan bencana dapat difokuskan pada pengembangan studi komparatif antar daerah yang memiliki karakteristik geografis dan tingkat kerawanan bencana yang serupa, guna memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh tentang praktik terbaik (*best practices*) dalam penanggulangan bencana. Selain itu, penelitian mendatang dapat memperluas pendekatan dengan menggunakan metode kuantitatif untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja BPBD serta efektivitas program mitigasi bencana. Pemanfaatan teknologi seperti pemetaan geospasial dan analisis big data dari sistem pelaporan masyarakat juga merupakan potensi pengembangan yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih responsif dan berbasis data. Penelitian lanjutan juga disarankan untuk mengeksplorasi perspektif psikososial masyarakat terdampak, yang selama ini masih kurang mendapatkan perhatian dalam kebijakan pemulihan pascabencana.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung dan memberikan kontribusi dalam penelitian ini. Terima kasih kepada pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan yang sangat berharga. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua informan yang telah meluangkan waktu dan berbagi pengetahuan serta pengalaman mereka, serta kepada keluarga dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan moral dan semangat. Tanpa bantuan dan dukungan dari semua pihak tersebut, penelitian ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Annisa Nurul, H. (2023). Analisis Kontribusi Aktivitas Seismik Terhadap Kejadian Tanah Longsor (Studi Kasus: Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung). *Sustainability (Switzerland)*, *11*(1), 1–14. [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)
- Ardani, S. N., Zulfikar, I., Setyawati, N. F., Siboro, I., & Pratamasari, I. (2024). Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Penanggulangan Bencana Tanah Longsor di Kota Balikpapan. *Jurnal Keselamatan, Kesehatan Kerja Dan Lindungan Lingkungan*, *10*(1), 49–56.

- Azeriansyah, R., Prasetyo, Y., & Yuwono, B. (2021). Analisis Identifikasi Dampak Bencana Tanah Longsor Dengan Menggunakan Unmanned Aerial Vehicle (UAV) (Studi Kasus : Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik). *Jurnal Geodesi Undip*, 6(4).
- Bao, H., Zeng, C., Peng, Y., & Wu, S. (2022). The use of digital technologies for landslide disaster risk research and disaster risk management: progress and prospects. *Environmental Earth Sciences*, 81(18). <https://doi.org/10.1007/s12665-022-10575-7>
- Dariagan, J. D., Atando, R. B., & Asis, J. L. B. (2021). Disaster preparedness of local governments in Panay Island, Philippines. *Natural Hazards*, 105(2). <https://doi.org/10.1007/s11069-020-04383-0>
- Doddy Bahtera Sentosa Panjaitan. (2022). Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Mitigasi Bencana Banjir Di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat Doddy. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(1).
- Elfina Grasia, Kismartini, Kismartini, M. M. (2023). Analisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Tanah Longsor Di Kota. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(3), 1–14. [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)
- Fajar, I., & Usman, B. (2023). Responsivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menghadapi Banjir Di Kabupaten Aceh Timur. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu ...*, 8(1).
- Hardiyanto, S., & Pulungan, D. (2019). Komunikasi Efektif Sebagai Upaya Penanggulangan Bencana Alam di Kota Padangsidempuan. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(1), 30–39. <https://doi.org/10.30596/interaksi.v3i1.2694>
- Helut, A. H. (2023). Kinerja Aparatur Dalam Penanggulangan Bencana Tanah Longsor Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon Provinsi Maluku. *Repository Institut Pemerintahan Dalam Negeri*, 3(10). <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i10.1213>
- Joko Prasetyo. (2021). Diseminasi Informasi Tingkat Kerawanan Tanah Longsor Menggunakan Arcgis Hub Melalui Pendekatan Unit Lahan Di Kabupaten Semarang. *Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang*, 4(2). <https://doi.org/10.55606/sinov.v4i2.32>
- Kemala Novriyanti, Muh. Irfan Mufti, Shadiq, Muhammad Ahsan Samad, & Rudi Salam. (2020). Kinerja Organisasi Pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu. *Jurnal Administrasi Publik*, 16(1). <https://doi.org/10.52316/jap.v16i1.40>
- Prastiyono, V. I., Maesaroh, & Widowati, N. (2021). Analisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Wonosobo. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(2).
- Sinamo, Samuel Kevin and Rohmadin, S.STP, M.Si, Dr. SulthonSinamo, Samuel Kevin and Rohmadin, S.STP, M.Si, Dr. S. (2024). Pengembangan Kapasitas Organisasi BPBD Dalam Penanggulangan Bencana Longsor Di Kabupaten Dairi. *Repository Institut Pemerintahan Dalam Negeri*.

- Valentina, Sela Pebri and Ilham, M. (2024). Evaluasi Pelaksanaan Kesiapsiagaan Bencana Banjir Di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. *Repository Institut Pemerintahan Dalam Negeri*. <http://eprints.ipdn.ac.id/17075/>
- Yuhana, K., & Sumarna, S. (2020). Kinerja Bidang Mitigasi Bencana Alam Kabupaten Subang. *The World of Public Administration Journal*. <https://doi.org/10.37950/wpaj.v2i1.903>

